



Analisis Manajemen Kepemimpinan dan Lembaga dalam Sistem Pendidikan di Kemenag, Diktis, Dikbud, dan Kementerian Terkait

Zulfa Rahmat Hidayati^{1✉}, Kasful Anwar Us², Shalahudin³

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia¹²³

e-mail : rhzulfa@gmail.com¹, kasfulanwarus@uinjambi.ac.id², shalahudin@uinjambi.ac.id³

Abstrak

Kepemimpinan dalam manajemen pendidikan berperan penting dalam menentukan arah, kualitas, dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kepemimpinan dan manajemen dalam lembaga pendidikan serta peranannya terhadap keberhasilan organisasi pendidikan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelaah literatur, jurnal, dan kebijakan pendidikan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan lembaga pendidikan sangat bergantung pada kemampuan pemimpin dalam mengintegrasikan gaya kepemimpinan visioner dengan manajemen yang efektif dan adaptif. Gaya kepemimpinan seperti transformasional, demokratis, dan karismatik terbukti mampu meningkatkan motivasi kerja, budaya organisasi, serta kualitas layanan pendidikan. Di sisi lain, penyalahgunaan otoritas dapat menghambat partisipasi dan inovasi tenaga pendidik. Restrukturisasi kelembagaan pendidikan nasional seperti pembentukan Kemendikdasmen, Kemendikti Saintek, dan Kemenbud RI mencerminkan upaya peningkatan tata kelola dan efektivitas manajemen pendidikan. Dengan demikian, kepemimpinan yang berkarakter, etis, dan kolaboratif menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan lembaga pendidikan yang unggul, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: kepemimpinan pendidikan, manajemen pendidikan, gaya kepemimpinan, efektivitas organisasi, transformasional

Abstract

Leadership in educational management plays a pivotal role in shaping the direction, quality, and overall effectiveness of educational administration. This study aims to examine the conceptual framework of leadership and management within educational institutions and their contributions to the organizational success of education in Indonesia. Employing a library research design, the study systematically reviews scholarly literature, academic journals, and relevant educational policies. The findings indicate that the success of educational institutions is largely determined by leaders' capacity to integrate visionary leadership approaches with effective and adaptive management practices. Leadership models such as transformational, democratic, and charismatic leadership have been shown to enhance work motivation, strengthen organizational culture, and improve the quality of educational services. Conversely, the misuse of authority may inhibit teacher participation and stifle innovation. Furthermore, the restructuring of national educational institutions such as the establishment of the Ministry of Basic and Secondary Education, the Ministry of Higher Education and Science, and the Ministry of Culture of the Republic of Indonesia reflects ongoing efforts to enhance governance and managerial effectiveness. Hence, leadership characterized by integrity, ethical awareness, and collaborative engagement emerges as a key determinant in building excellent, competitive, and sustainable educational institutions.

Keywords: educational leadership, educational management, leadership models, organizational effectiveness, transformational leadership

Copyright (c) 2025 Zulfa Rahmat Hidayati, Kasful Anwar Us, Shalahudin

✉ Corresponding author :

Email : rhzulfa@gmail.com

DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v7i6.8637>

ISSN 2656-8063 (Media Cetak)

ISSN 2656-8071 (Media Online)

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun peradaban suatu bangsa (Syakdiyah et al., 2025). Ia tidak hanya berperan dalam mentransfer ilmu pengetahuan, melainkan juga membentuk karakter, nilai-nilai kebangsaan, dan integritas generasi masa depan. Di tengah dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terus berkembang, sistem pendidikan nasional dihadapkan pada tuntutan untuk mampu beradaptasi, inovatif, dan responsif terhadap perubahan zaman (Jin et al., 2025). Untuk menjawab tantangan tersebut, dibutuhkan manajemen kepemimpinan yang kuat dan efektif dalam mengelola lembaga pendidikan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Manajemen kepemimpinan dalam konteks pendidikan bukan sekadar proses administratif, melainkan mencakup kemampuan untuk mengarahkan, menginspirasi, dan mengorganisasi seluruh sumber daya agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal (Trisnia & Ma'ad, 2025). Pemimpin dalam dunia pendidikan harus mampu menjadi agen perubahan, bukan hanya pengelola kebijakan (Haudi, 2022).. Oleh karena itu, penting untuk memahami prinsip-prinsip dasar manajemen kepemimpinan, terutama dalam konteks lembaga pendidikan yang memiliki struktur dan fungsi yang kompleks.

Di Indonesia, sistem pendidikan diselenggarakan oleh berbagai jenis lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang berada di bawah naungan kementerian tertentu. Umumnya, ada dua kementerian utama yang berperan dalam pengelolaan pendidikan yaitu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Agama (Kemenag) (Irsalulloh & Maunah, 2023). Di dalam Kemenag, terdapat Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) yang memiliki mandat khusus dalam pengembangan pendidikan tinggi Islam. Meskipun saat ini dua lembaga tersebut telah dipecah-pecah lagi menjadi berbagai lembaga dengan tupoksinya masing-masing dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo, setiap lembaga ini tetap memiliki karakteristik, struktur, dan kewenangan tersendiri dalam membentuk arah kebijakan pendidikan nasional. Jika ditelaah lebih jauh, peran lembaga-lembaga pendidikan dalam pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari agenda strategis negara. Mereka menjadi pelaksana kebijakan sekaligus penggerak kualitas sumber daya manusia. Kemenag, melalui madrasah dan perguruan tinggi keagamaan, misalnya, memainkan peran penting dalam penguatan nilai-nilai keagamaan dan toleransi. Di sisi lain, Kemendikbudristek memiliki tanggung jawab besar dalam menyelenggarakan pendidikan umum yang inklusif dan kompetitif secara global. Sinergi antara lembaga-lembaga ini menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem pendidikan yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Keberagaman jenis lembaga pendidikan di Indonesia ini mencerminkan pluralitas sistem yang harus dikelola dengan pendekatan manajerial yang tepat. Lembaga pendidikan formal seperti sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi, serta lembaga nonformal seperti pesantren dan pusat kegiatan belajar masyarakat, semuanya memerlukan kepemimpinan yang profesional, partisipatif, dan visioner (Gore et al., 2025). Tanpa manajemen yang baik, potensi lembaga pendidikan tidak akan mampu berkembang secara maksimal, bahkan dapat mengalami stagnasi (Gore, 2025).

Namun, berdasarkan kajian pustaka, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap) dalam konteks kepemimpinan pendidikan di Indonesia. Beberapa studi terdahulu seperti oleh (Hasanah, 2025), (Raharjo, 2023) dan (Anggraini et al., 2025) lebih banyak menyoroti *gaya kepemimpinan transformasional* di tingkat sekolah, tetapi belum banyak yang mengkaji keterpaduan antara konsep kepemimpinan dan manajemen pendidikan dalam berbagai tipe lembaga pendidikan secara komprehensif. Selain itu, penelitian oleh (Elia et al., 2023) menekankan efektivitas kepemimpinan kepala sekolah, namun kurang menyoroti relevansinya dengan restrukturisasi kelembagaan pendidikan nasional yang terjadi belakangan ini. Sementara itu, studi oleh (Ihwan, 2025) menyoroti kepemimpinan visioner dalam konteks global, tetapi belum mengaitkannya dengan dinamika birokrasi dan kebijakan di Indonesia yang memiliki struktur kementerian ganda (Kemendikbudristek dan Kemenag).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini menawarkan kontribusi kebaruan (novelty) berupa analisis konseptual tentang hubungan antara kepemimpinan dan manajemen pendidikan di berbagai jenis lembaga pendidikan di Indonesia, dalam konteks restrukturisasi sistem pendidikan nasional terkini. Kajian ini tidak hanya menyoroti gaya kepemimpinan ideal, tetapi juga menekankan integrasi antara *visionary leadership* dan *adaptive management* dalam mendukung tata kelola pendidikan yang efektif dan berkelanjutan.

Penelitian ini penting dilakukan karena kepemimpinan yang efektif tidak hanya memengaruhi kinerja lembaga pendidikan, tetapi juga berimplikasi pada kualitas sumber daya manusia dan daya saing bangsa. Dengan memahami karakteristik dan dinamika kepemimpinan dalam berbagai tipe lembaga pendidikan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis bagi penguatan manajemen pendidikan nasional yang berkarakter, kolaboratif, dan adaptif terhadap tantangan masa depan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada pemahaman mendalam terhadap konsep, kebijakan, serta praktik manajemen kepemimpinan dan kelembagaan dalam sistem pendidikan di bawah koordinasi Kementerian Agama (Kemenag), Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), serta kementerian terkait lainnya. Data penelitian diperoleh dari sumber-sumber sekunder yang meliputi literatur akademik, hasil penelitian terdahulu, buku-buku ilmiah, serta jurnal nasional maupun internasional, serta dokumen resmi pemerintah seperti undang-undang, peraturan menteri, dan pedoman pelaksanaan kebijakan pendidikan yang relevan dengan topik kepemimpinan dan manajemen pendidikan. Secara keseluruhan, penelitian ini menelaah 60 literatur, yang terdiri atas 30 artikel jurnal ilmiah, 7 buku akademik, dan 23 laporan penelitian atau dokumen kebijakan resmi. Pemilihan literatur dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan reputasi dan kredibilitas sumber. Selain itu, aspek keterkinian menjadi perhatian utama dengan mengutamakan publikasi sepuluh tahun terakhir (2015–2025) agar analisis tetap relevan dengan perkembangan terbaru dalam bidang kepemimpinan dan manajemen pendidikan. Literatur yang dipilih juga harus memiliki keterkaitan substansial dengan variabel penelitian seperti gaya kepemimpinan, efektivitas manajemen, dan tata kelola lembaga pendidikan, serta memenuhi standar keabsahan ilmiah melalui metode penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan dan konteks yang sesuai dengan sistem pendidikan di Indonesia. Seluruh literatur tersebut dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui pendekatan content analysis untuk menghasilkan sintesis konseptual yang komprehensif mengenai dinamika kepemimpinan dan manajemen pendidikan di berbagai jenis lembaga pendidikan.

Tahapan pengumpulan data dilakukan melalui proses inventarisasi, identifikasi, dan klasifikasi literatur sesuai topik kajian. Selanjutnya, peneliti melakukan reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan, kemudian klasifikasi tematik berdasarkan kategori utama, seperti struktur organisasi, kebijakan kelembagaan, pola kepemimpinan, serta koordinasi antar instansi pendidikan. Analisis data menggunakan pendekatan interpretatif-konseptual, yaitu dengan menafsirkan isi dokumen dan literatur untuk menemukan pola hubungan, kesamaan, maupun perbedaan antar sistem pendidikan yang dikelola oleh kementerian terkait. Selain itu, digunakan teknik analisis komparatif guna menilai sejauh mana efektivitas dan karakteristik manajemen kepemimpinan di masing-masing lembaga pendidikan.

Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis, dengan tujuan memberikan gambaran yang utuh mengenai dinamika manajemen kepemimpinan dan kelembagaan pendidikan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan fenomena yang terjadi, tetapi juga berupaya memberikan pemahaman konseptual dan reflektif terhadap arah kebijakan dan tata kelola pendidikan nasional yang terintegrasi lintas kementerian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Kepemimpinan dalam Lembaga Pendidikan

Kepemimpinan dalam manajemen pendidikan memegang peranan yang sangat strategis dalam menentukan arah dan keberhasilan sebuah lembaga pendidikan (Judijanto et al., 2024). Seorang pemimpin yang efektif tidak hanya bertugas memberi arahan, tetapi juga berperan sebagai sumber inspirasi dan motivasi bagi seluruh elemen dalam sebuah lembaga (Judijanto et al., 2024). Kepemimpinan yang baik mampu menggerakkan stakeholder untuk bekerja secara sinergis dalam mewujudkan visi dan misi institusi pendidikan (Sidik & Nugraha, 2024). Kepemimpinan dalam konteks manajerial juga menuntut keterampilan teknis dan strategis, seperti kemampuan mengelola sumber daya secara efisien, merancang program pengembangan profesional bagi tenaga pendidik, serta melakukan evaluasi secara berkesinambungan terhadap program dan kebijakan yang dijalankan (Efendi & Sholeh, 2023). Dalam hal ini, pemimpin pendidikan berperan sebagai agen perubahan yang mampu menerjemahkan visi besar menjadi langkah konkret di lapangan.

Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang dalam membimbing, memengaruhi, dan menggerakkan individu maupun kelompok menuju pencapaian suatu tujuan bersama (Nasution, 2016). Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat berperan dalam organisasi atau lembaga (Yustika & Syamsiyah, 2020). Covey dalam Shobirin mengemukakan bahwa 90 persen dari semua kegagalan kepemimpinan adalah kegagalan pada karakter (Shobirin, 2016). Sehingga menurutnya seorang pemimpin dituntut untuk memiliki kemampuan komunikasi yang baik, arah visi yang terstruktur, serta ketajaman dalam mengambil keputusan di berbagai situasi. Esensi dari kepemimpinan tidak terletak semata pada kemampuan memberi instruksi, melainkan juga mencakup upaya dalam menguatkan peran anggota tim, menumbuhkan semangat kerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat (Syakur et al., 2025). Lebih jauh, pemimpin yang efektif mampu membangun rasa saling percaya serta menumbuhkan loyalitas dalam kelompok yang dipimpinnya (Rini, 2006). Dengan demikian, kepemimpinan mencakup dimensi perilaku dan tindakan nyata yang dapat mendorong kemajuan dan keberhasilan baik bagi individu maupun organisasi secara keseluruhan.

Ki Hadjar Dewantara memperkenalkan konsep kepemimpinan yang mencakup tiga peran utama: memberi teladan di depan (Ing Ngarsa Sung Tuladha), membangkitkan semangat dan gagasan di tengah (Ing Madya Mangun Karsa), serta memberikan dukungan dari belakang (Tut Wuri Handayani) (Gore et al., 2025). Ketiga prinsip ini menggambarkan model kepemimpinan yang menyeluruh, di mana seorang pemimpin dapat berperan fleksibel sesuai kebutuhan, tanpa melihat tingkatannya, melainkan berdasarkan peran yang diemban dalam situasi tertentu.

Berdasarkan dari beberapa definisi yang telah dikemukakan tersebut, kepemimpinan dapat dimaknai sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam upaya mengarahkan, mengatur, dan menyelaraskan perilaku anggota lain yang berada dalam suatu organisasi atau kelompok tertentu. Tujuan utama dari tindakan tersebut adalah untuk menciptakan koordinasi yang efektif sehingga setiap individu dapat bergerak dalam satu visi dan misi yang telah disepakati bersama. Kepemimpinan tidak hanya berperan dalam memberi instruksi, tetapi juga mencakup proses membangun komunikasi, memperkuat kerja sama, serta menciptakan kondisi yang kondusif agar seluruh komponen dalam kelompok mampu bekerja secara harmonis demi mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kepemimpinan berfungsi sebagai poros penggerak yang memastikan setiap bagian dari sistem organisasi bergerak menuju arah yang benar dan terencana.

Sementara itu, manajemen pendidikan adalah proses pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, mencakup aspek kurikulum, tenaga pendidik, keuangan, sarana, serta evaluasi, guna mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan bagi semua pihak terkait (Suryadi et al., 2024). Dalam dunia pendidikan, kepemimpinan dan manajemen merupakan dua konsep yang tidak hanya saling berhubungan, tetapi juga saling menguatkan dalam praktik penyelenggaraan lembaga pendidikan (Duryat, 2021). Keduanya menjadi elemen penting yang mendasari terciptanya sistem pendidikan

yang terarah, terorganisir, dan berorientasi pada pencapaian tujuan institusional. Kepemimpinan pendidikan lebih dari sekadar posisi atau jabatan; ia merupakan kemampuan strategis seorang pemimpin untuk menanamkan semangat, memotivasi, dan mengarahkan seluruh elemen dalam lingkungan sekolah, baik pendidik, tenaga kependidikan, maupun peserta didik (Al Haqiy & Muttaqin, 2024). Seorang pemimpin pendidikan dituntut mampu memberikan inspirasi melalui visi yang jelas dan tindakan yang konsisten, sehingga menciptakan budaya kerja yang positif dan produktif. Dalam konteks ini, manajemen pendidikan berperan dalam mendukung perwujudan visi tersebut melalui pengelolaan yang sistematis atas sumber daya manusia, sarana, kurikulum, dan evaluasi (Judijanto et al., 2024). Hubungan yang erat antara kepemimpinan dan manajemen menunjukkan bahwa keberhasilan lembaga pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kecakapan teknis dalam mengelola, tetapi juga oleh kemampuan kepemimpinan yang mampu membangkitkan komitmen kolektif untuk mencapai tujuan bersama.

Oleh karena itu, keberhasilan lembaga pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemimpinnya dalam mengintegrasikan antara kepemimpinan visioner dengan praktik manajemen yang sistematis dan terukur. Kombinasi keduanya menjadi fondasi utama dalam menciptakan institusi pendidikan yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan.

1. Model atau Jenis Kepemimpinan

Setiap gaya kepemimpinan memiliki karakteristik, pendekatan, dan dampak yang berbeda terhadap dinamika organisasi, motivasi staf pengajar, serta pencapaian tujuan institusional (Dari et al., 2023). Terdapat beragam model atau jenis gaya kepemimpinan yang dapat diimplementasikan untuk menunjang efektivitas pengelolaan institusi dan peningkatan mutu pendidikan. Beberapa bentuk gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan dalam lembaga pendidikan (Rosita, 2024), di antaranya gaya transformasional, yang menekankan inspirasi dan motivasi dalam mencapai tujuan Bersama, gaya demokratis, yang melibatkan partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan; serta gaya suportif, yang berorientasi pada pemberian dukungan emosional dan motivasi kerja.

Sementara itu, gaya transaksional menekankan hubungan berbasis penghargaan dan hukuman, sedangkan gaya karismatik mengandalkan daya tarik personal pemimpin dalam memengaruhi bawahan. Adapun gaya otokratis berpusat pada kontrol penuh pemimpin dalam pengambilan keputusan tanpa banyak partisipasi anggota. Setiap gaya tersebut memiliki keunggulan dan keterbatasan masing-masing, tergantung pada konteks, budaya organisasi, serta karakteristik lembaga pendidikan.

2. Otoritas Kepemimpinan dalam Lembaga Pendidikan

Otoritas adalah hak formal yang melekat pada suatu jabatan dalam organisasi, memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk membuat keputusan, memberikan perintah, dan mengatur sumber daya guna mencapai tujuan organisasi (Ficky, 2024). Otoritas ini bersifat sah dan diakui secara struktural, berbeda dengan kekuasaan yang lebih luas dan dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk pengaruh pribadi atau keahlian. Namun, penggunaan otoritas yang tidak bijaksana atau disalahgunakan dapat merugikan organisasi, menimbulkan ketidakadilan, dan merusak kepercayaan bawahan (Yusup, 2018). Oleh karena itu, penting bagi pemegang otoritas untuk menjalankan wewenangnya dengan integritas, tanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai etika organisasi.

Max Weber (1947) dalam Sulhan & Lessy mengklasifikasikan otoritas ke dalam tiga bentuk utama, yaitu karismatik, tradisional, dan legal-rasional (Sulhan & Lessy, 2022). Ketiganya menggambarkan dasar legitimasi kepemimpinan yang memengaruhi hubungan antara pemimpin dan pengikut dalam suatu sistem sosial. Pertama, otoritas karismatik muncul karena keyakinan masyarakat terhadap kemampuan luar biasa atau kepribadian kuat yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Bentuk otoritas ini bersifat emosional dan tidak selalu rasional, karena legitimasi kepemimpinan bergantung sepenuhnya pada daya tarik personal dan kepercayaan pengikut terhadap figur pemimpin tersebut.

Kedua, otoritas tradisional berakar pada sistem nilai, kebiasaan, atau tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam tipe ini, kepemimpinan diterima karena dianggap sakral, turun-temurun, atau melekat pada struktur sosial yang telah lama mapan. Kepatuhan pengikut lebih didasarkan pada rasa hormat terhadap tradisi dan legitimasi yang dibangun melalui warisan sosial. Ketiga, otoritas legal-rasional didasarkan pada sistem hukum formal dan aturan yang sah secara institusional. Pemimpin dalam model ini memperoleh kewenangan melalui mekanisme administratif atau prosedur legal, seperti pemilihan umum atau penunjukan resmi. Kepatuhan masyarakat bukan ditujukan pada pribadi pemimpin, melainkan pada legitimasi hukum dan norma rasional yang mengatur sistem pemerintahan atau organisasi. Klasifikasi Weber tersebut menunjukkan bahwa legitimasi kepemimpinan dalam suatu lembaga, termasuk lembaga pendidikan, tidak hanya bergantung pada individu pemimpinnya, tetapi juga pada struktur sosial, sistem hukum, dan budaya organisasi yang membentuk hubungan otoritatif di dalamnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa otoritas bukan semata-mata kekuasaan yang melekat pada jabatan formal, melainkan mencakup legitimasi yang diperoleh melalui kepercayaan, nilai-nilai budaya, norma hukum, serta pengakuan dari anggota organisasi atau masyarakat yang dipimpin. Dengan memahami bentuk dan fungsi otoritas secara ilmiah, pemimpin dapat menghindari penyalahgunaan kekuasaan serta mampu membangun kepercayaan, ketaatan yang rasional, dan lingkungan kerja yang produktif dan beretika.

3. Peran Kepemimpinan dalam Lembaga Pendidikan

Kepemimpinan memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia Pendidikan (Rachman et al., 2023). Seorang pemimpin pendidikan, baik itu kepala sekolah, pengawas, maupun pemimpin lembaga pendidikan lainnya, bertanggung jawab tidak hanya dalam aspek administratif, tetapi juga dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, membangun budaya sekolah yang positif, serta mendorong pertumbuhan profesional guru dan prestasi peserta didik (Rachman et al., 2023). Dalam konteks ini, kepemimpinan bukan sekadar posisi, melainkan sebuah pengaruh yang mampu menggerakkan seluruh komponen pendidikan ke arah perubahan dan perbaikan berkelanjutan. Kepemimpinan memiliki sejumlah fungsi strategis dalam lembaga pendidikan yang berperan langsung terhadap pencapaian visi, misi, dan mutu institusi (Ginting & Haryati, 2012). Pertama, kepemimpinan berfungsi untuk mengatur dan mengarahkan visi serta misi lembaga pendidikan, sehingga setiap aktivitas akademik dan administratif berjalan dalam kerangka tujuan yang sama. Fungsi ini menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan, perencanaan program, dan pengambilan keputusan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan.

Kedua, kepemimpinan berperan dalam meningkatkan kinerja seluruh pemangku kepentingan. Seorang pemimpin yang efektif mampu memotivasi, memberi dukungan, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi guru dan tenaga kependidikan agar lebih produktif. Ketiga, kepemimpinan juga berfungsi dalam membangun budaya organisasi yang positif melalui penanaman nilai disiplin, kerja sama, dan etika profesional. Budaya lembaga yang sehat akan menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap kemajuan pendidikan. Selain itu, seorang pemimpin pendidikan dituntut untuk menjadi teladan dalam moral dan etika, karena kepribadian dan integritasnya akan menjadi panutan bagi seluruh civitas akademika. Di sisi lain, kepemimpinan yang efektif juga harus mampu mendorong inovasi dan perubahan positif agar lembaga pendidikan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Fungsi penting lainnya adalah mengelola konflik dan menjaga hubungan sosial yang harmonis di lingkungan sekolah atau madrasah. Kemampuan ini diperlukan untuk menciptakan suasana kerja yang stabil, demokratis, dan kolaboratif. Dengan demikian, kepemimpinan dalam lembaga pendidikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga transformasional menggerakkan seluruh elemen lembaga menuju tercapainya tujuan pendidikan yang optimal.

Berbagai Lembaga Pendidikan di Indonesia

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke (Akhmad, 2020). Kondisi geografis ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tantangan tersendiri dalam pemerataan dan pengelolaan sistem pendidikan. Tidak hanya terbagi oleh wilayah fisik, masyarakat Indonesia juga terdiri dari ratusan suku bangsa dengan latar belakang budaya, bahasa, dan nilai-nilai sosial yang sangat beragam. Hal ini membuat sistem pendidikan nasional tidak bisa disusun secara seragam, melainkan harus mempertimbangkan konteks lokal dan kearifan budaya di setiap daerah. Keragaman ini kemudian menciptakan struktur pendidikan yang kompleks, baik dari sisi kurikulum, metode pengajaran, hingga distribusi tenaga pendidik. Pemerintah dituntut untuk merancang sistem pendidikan yang adaptif, fleksibel, dan inklusif agar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil dan tertinggal. Tantangan utama dalam pendidikan di Indonesia terletak pada disparitas kualitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta keterbatasan akses terhadap sumber daya pendidikan yang merata (Syafii, 2018).

Lebih lanjut, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, indeks pembangunan pendidikan di provinsi-provinsi Indonesia masih menunjukkan ketimpangan, terutama antara kawasan Indonesia bagian barat dan timur (Sahal, 2023). Sistem pendidikan nasional perlu terus dikembangkan melalui pendekatan berbasis wilayah dan kebutuhan lokal agar pemerataan serta keadilan pendidikan dapat terwujud. Kompleksitas geografis dan sosial budaya Indonesia menuntut sistem pendidikan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga kontekstual dan partisipatif agar seluruh anak bangsa memperoleh akses pendidikan secara adil (Khadijah & Puspita, 2023).

Lembaga pendidikan di Indonesia sangat beragam, mencakup pendidikan formal (sekolah dasar hingga perguruan tinggi), nonformal (kursus dan pelatihan), serta informal (pendidikan dalam keluarga dan masyarakat) (Mildawati & Tangngareng, 2023). Ketiganya berperan penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam mengelola sistem pendidikan yang luas dan beragam tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) semula memegang seluruh urusan pendidikan dan kebudayaan (Indonesia, n.d.). Namun, sejak tahun 2024, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan restrukturisasi besar dengan memisahkan Kemendikbudristek menjadi tiga kementerian: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), serta Kementerian Kebudayaan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan fokus dan efektivitas pengelolaan masing-masing bidang (Indonesia, 2024b). Selain ketiga kementerian tersebut, pengelolaan pendidikan nasional juga melibatkan Kementerian Agama (Kemenag) yang menaungi pendidikan keagamaan, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang bertanggung jawab atas riset dan inovasi nasional. Berikut merupakan berbagai lembaga pendidikan di Indonesia:

1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dibentuk pada tahun 2024 sebagai hasil restrukturisasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) (Indonesia, 2024a). Restrukturisasi ini dilakukan untuk meningkatkan fokus dan efektivitas pengelolaan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Kementerian ini dipimpin oleh Prof. Abdul Mu'ti, M.Ed., dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Sebagai lembaga yang mengoordinasikan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah, Kemendikdasmen memegang peran sentral dalam membangun kualitas pendidikan nasional. Tugas utamanya meliputi perumusan kebijakan nasional, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah, termasuk pendidikan anak usia dini, pendidikan khusus, dan layanan pendidikan khusus (Gede & Siswadi, 2025).

Kemendikdasmen didukung oleh berbagai unit strategis, antara lain Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), serta Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (Sanmarwi & Sulastris, 2022). Setiap unit memiliki peran spesifik dalam memastikan mutu pendidikan dan keselarasan kebijakan secara nasional. Dalam pelaksanaannya, Kemendikdasmen menetapkan beberapa program prioritas nasional, antara lain (Suyana et al., 2024):

- 1) Wajib Belajar 13 Tahun untuk menjamin akses pendidikan hingga jenjang menengah.
- 2) Penguatan Pendidikan Karakter melalui integrasi nilai-nilai moral dalam kurikulum;
- 3) Peningkatan kompetensi guru melalui program PPG dan pelatihan berkelanjutan;
- 4) Penguatan literasi, numerasi, dan teknologi sebagai keterampilan abad ke-21; serta
- 5) Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan produktif.

Melalui struktur organisasi yang terintegrasi dan program strategis yang adaptif, Kemendikdasmen berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah guna mencetak generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan kompetitif di era global.

2. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) dibentuk pada tahun 2024 sebagai hasil restrukturisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) (Indonesia, 2024b). Pembentukan kementerian ini bertujuan memperkuat fokus pemerintah terhadap peningkatan mutu pendidikan tinggi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Dengan pemisahan kelembagaan ini, diharapkan koordinasi antara sektor pendidikan tinggi dan riset menjadi lebih terpadu, efektif, dan adaptif terhadap tantangan global (Gede & Siswadi, 2025).

Sejak 19 Februari 2025, Kemendikti Saintek dipimpin oleh Prof. Brian Yulianto, Ph.D., seorang akademisi dan peneliti berpengalaman di bidang inovasi dan manajemen riset. Di bawah kepemimpinannya, kementerian ini menegaskan visi untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi Indonesia, memperkuat ekosistem penelitian nasional, serta mendorong hilirisasi hasil riset ke sektor industri. Kemendikti Saintek bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Cakupan tugas tersebut meliputi pengembangan perguruan tinggi negeri dan swasta, penguatan sistem riset dan inovasi nasional, serta integrasi antara pendidikan tinggi dan kebutuhan dunia industri. Dalam pelaksanaannya, kementerian ini menjalankan sejumlah fungsi strategis, seperti perumusan kebijakan nasional, koordinasi antar lembaga pendidikan dan riset, penguatan Tridharma Perguruan Tinggi, serta pengembangan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan (Kemendiktisaintek, 2024).

Selain itu, Kemendikti Saintek berperan aktif dalam peningkatan mutu penelitian dan publikasi ilmiah, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta transformasi digital pendidikan tinggi melalui pengembangan platform pembelajaran daring dan sistem data terintegrasi. Beberapa program prioritas nasional yang dijalankan antara lain (Kemendiktisaintek, 2025):

- 1) Peningkatan daya saing perguruan tinggi melalui internasionalisasi dan akreditasi global;
- 2) Penguatan riset dan inovasi terapan yang berdampak langsung pada masyarakat dan industri;
- 3) Digitalisasi pendidikan tinggi dengan penerapan sistem e-learning, big data, dan kecerdasan buatan; serta
- 4) Program link and match dunia industri guna memastikan kesesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan pasar kerja.

Dengan berbagai kebijakan strategis tersebut, Kemendikti Saintek berperan sebagai penggerak utama transformasi pendidikan tinggi Indonesia menuju sistem yang berdaya saing global, berbasis riset, dan didukung oleh inovasi teknologi yang berkelanjutan.

3. Kementerian Kebudayaan

Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenbud RI) dibentuk pada tahun 2024 sebagai hasil restrukturisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Pembentukan kementerian ini bertujuan untuk memperkuat fokus pemerintah dalam pelestarian, pengembangan, dan pemajuan kebudayaan nasional, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Sejak 21 Oktober 2024, Kemenbud RI dipimpin oleh Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan dan Giring Ganesha sebagai Wakil Menteri. Kementerian ini bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, yang mencakup aspek perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan nasional (RI, 2024).

Dalam menjalankan tugasnya, Kemenbud RI memiliki sejumlah fungsi strategis, antara lain perumusan dan penetapan kebijakan nasional di bidang kebudayaan, pelaksanaan kebijakan pelestarian dan pengembangan warisan budaya, serta koordinasi pembinaan dan dukungan administrasi terhadap seluruh unit kerja di lingkungan kementerian. Selain itu, Kemenbud juga bertanggung jawab atas pengelolaan aset budaya nasional, pengawasan pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan langsung oleh Presiden (Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia, 2020).

Secara kelembagaan, Kemenbud RI berperan penting dalam memperkuat identitas bangsa melalui kebijakan yang berpihak pada pelaku budaya dan keberagaman lokal. Kementerian ini juga mendorong sinergi antara kebudayaan, pendidikan, dan teknologi agar kebudayaan Indonesia tidak hanya dilestarikan, tetapi juga dikembangkan sebagai sumber daya kreatif dan kekuatan diplomasi nasional di tingkat global.

4. Kementerian Agama Republik Indonesia

Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) merupakan salah satu kementerian strategis dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto periode 2024–2029. Kemenag dipimpin oleh Prof. Dr. Nasaruddin Umar, M.A. sebagai Menteri Agama dan Dr. K.H. Romo R. Muhammad Syafi'i, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Menteri Agama, yang resmi dilantik pada 21 Oktober 2024. Keduanya dikenal sebagai tokoh yang memiliki komitmen kuat terhadap pendidikan keagamaan, moderasi beragama, dan toleransi antarumat beragama di Indonesia (Wikipedia, 2025b).

Kemenag memiliki tanggung jawab utama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang agama, meliputi pembinaan kehidupan beragama yang harmonis, penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan, serta pengelolaan pelayanan haji, umrah, dan jaminan produk halal. Kementerian ini berperan strategis dalam membantu Presiden mewujudkan pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai moral, spiritual, dan kemanusiaan universal (UURI, 2024).

Dalam menjalankan mandatnya, Kemenag melaksanakan fungsi utama berupa perumusan dan penetapan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat lintas agama, penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan, pengawasan internal dan pembinaan kelembagaan, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di seluruh satuan kerja pusat dan daerah. Selain itu, Kemenag juga menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian, serta pengembangan sumber daya manusia keagamaan guna memperkuat kapasitas kelembagaan dan meningkatkan kualitas pelayanan public (UURI, 2024).

Secara struktural, Kemenag terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana teknis yang terintegrasi, antara lain Menteri Agama, Wakil Menteri Agama, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, serta berbagai Direktorat Jenderal dan badan pendukung. Di antara unit strategisnya, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) memiliki peran signifikan dalam penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia, termasuk pengelolaan madrasah dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis). Selain itu, terdapat pula Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat yang menaungi masing-masing agama besar di Indonesia Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha serta Badan

Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM (BMBPSDM) yang berperan dalam mempromosikan nilai-nilai moderasi beragama dan penguatan kapasitas ASN Kemenag (Kementerian Agama RI, 2018).

Peran Kemenag tidak terbatas pada pengelolaan aspek ritual keagamaan, tetapi juga meluas pada pembangunan peradaban bangsa melalui pendidikan, moderasi beragama, dan penguatan literasi keagamaan. Kemenag menjadi garda terdepan dalam menghadapi tantangan global, seperti meningkatnya intoleransi, radikalisme, dan penyebaran disinformasi yang mengatasnamakan agama. Melalui kebijakan Moderasi Beragama, Kemenag menegaskan komitmennya untuk merajut harmoni sosial, memperkuat toleransi lintas iman, dan meneguhkan identitas Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 (Arhanuddin Salim, 2023).

Dengan demikian, Kementerian Agama berfungsi tidak hanya sebagai penjaga nilai-nilai spiritual dan moral bangsa, tetapi juga sebagai penggerak utama pembangunan karakter dan integritas nasional. Melalui program-program yang inklusif, profesional, dan berorientasi pelayanan publik, Kemenag terus berupaya membentuk masyarakat Indonesia yang religius, berilmu, toleran, dan berakhlak mulia, sesuai dengan visi “Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong” (UURI, 2024),

5. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia (BRIN, 2025). BRIN dibentuk sebagai upaya strategis pemerintah untuk mengintegrasikan seluruh kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap), serta memperkuat ekosistem inovasi nasional yang sebelumnya tersebar di berbagai kementerian dan lembaga (Nul & Yuliana, 2025).

BRIN didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021, yang secara resmi menggabungkan empat lembaga riset utama, yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Integrasi ini menjadi tonggak penting dalam penyatuan arah dan tata kelola riset nasional agar lebih efisien, terkoordinasi, dan berorientasi hasil (output-based research) (RI, 2021).

Sebagai lembaga riset terpadu, BRIN memiliki mandat untuk menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan litbangjirap secara nasional, mencakup perumusan kebijakan riset dan inovasi, pelaksanaan penelitian tematik lintas disiplin, sinkronisasi program riset antarinstansi, serta fasilitasi dukungan sumber daya riset nasional. BRIN juga bertanggung jawab dalam pengelolaan sarana-prasarana penelitian, pembiayaan riset, dan penguatan jejaring ilmiah, baik di tingkat nasional maupun internasional (Wikipedia, 2025a).

Secara kelembagaan, BRIN menaungi sejumlah Organisasi Riset (OR) tematik yang berfokus pada bidang-bidang strategis seperti ilmu pengetahuan hayati, sosial-humaniora, energi, kebumih, dan teknologi manufaktur. Melalui struktur ini, BRIN berperan sebagai pusat koordinasi, inkubasi, dan akselerasi riset nasional, yang berorientasi pada penguatan inovasi berbasis sains (BRIN, 2025).

Dalam konteks ekosistem riset Indonesia, BRIN dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) berfungsi saling melengkapi. BRIN berperan sebagai pelaksana utama kegiatan riset dan inovasi nasional, sementara Kemendikti Saintek berfokus pada perumusan kebijakan dan pembinaan pendidikan tinggi serta riset akademik. Kolaborasi sinergis antara kedua lembaga ini diharapkan mampu memperkuat daya saing Indonesia dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi di tingkat global.

Kontribusi dan Fungsi lembaga dalam pendidikan Nasional

Lembaga pendidikan memiliki peran krusial dalam membentuk kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia (Sandra, 2021). Sebagai institusi sosial, lembaga pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai agen sosialisasi yang menanamkan nilai-nilai budaya, moral, dan etika kepada individu (Mawardi, 2022). Lembaga pendidikan merupakan institusi sosial yang menjadi agen sosialisasi lanjutan setelah keluarga (Mawardi, 2022). Dalam lembaga pendidikan, individu dikenalkan dengan kehidupan bermasyarakat yang lebih luas, sehingga mereka dapat memahami peran dan tanggung jawabnya dalam masyarakat. Lembaga pendidikan juga berfungsi sebagai tempat untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Syakrani et al., 2025).

Lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia dan menentukan arah kemajuan bangsa (Mawardi, 2022). Pendidikan yang bermutu bukan hanya menghasilkan generasi cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter, berdaya saing, dan berkomitmen terhadap pembangunan nasional (Munir et al., 2025). Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pendidikan menjadi investasi jangka panjang yang bernilai strategis bagi kemajuan bangsa di masa depan.

Lembaga pendidikan di Indonesia memegang sejumlah tanggung jawab penting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan nasional. *Pertama*, lembaga pendidikan berperan dalam mendukung pencapaian Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Kedua*, lembaga pendidikan turut berkontribusi dalam pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman dan karakteristik peserta didik. *Ketiga*, lembaga pendidikan harus menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan dunia industri, guna memperkuat sinergi dalam peningkatan mutu pendidikan (Huriati et al., 2025).

Selain itu, lembaga pendidikan juga memiliki tanggung jawab terhadap evaluasi dan akuntabilitas baik secara internal maupun eksternal. Evaluasi dilakukan secara sistematis untuk menjamin mutu pembelajaran, sedangkan akuntabilitas diwujudkan melalui pelaporan kinerja kepada pemerintah dan masyarakat sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab publik. Dengan demikian, peran lembaga pendidikan tidak hanya berfokus pada proses belajar mengajar, tetapi juga pada penguatan tata kelola, inovasi, serta kontribusi terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kepemimpinan dalam manajemen pendidikan memiliki peran strategis dalam menentukan arah, kebijakan, dan keberhasilan lembaga pendidikan. Seorang pemimpin tidak hanya berfungsi sebagai pengarah, tetapi juga sebagai inspirator, motivator, dan agen perubahan yang mampu menggerakkan seluruh stakeholder menuju visi dan misi institusi. Kepemimpinan efektif menuntut kemampuan komunikasi, pengambilan keputusan, serta pengelolaan sumber daya secara efisien. Esensi kepemimpinan terletak pada kemampuan membangun kerja sama, menumbuhkan semangat kerja, serta menciptakan lingkungan yang sehat dan produktif. Ki Hadjar Dewantara menegaskan tiga peran pemimpin ideal: memberi teladan di depan, membangun semangat di tengah, dan memberi dorongan dari belakang.

Manajemen pendidikan sendiri merupakan proses pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kepemimpinan dan manajemen saling berkaitan; kepemimpinan menumbuhkan semangat dan arah, sedangkan manajemen mengatur dan mengoordinasikan pelaksanaannya. Keduanya menjadi fondasi penting bagi terciptanya lembaga pendidikan yang adaptif dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, terdapat berbagai model kepemimpinan seperti transformasional, demokratis, suportif, transaksional, karismatik, dan otokratis masing-masing memiliki karakteristik dan efektivitas berbeda tergantung konteks lembaga. Sementara itu, otoritas kepemimpinan merupakan legitimasi formal yang

memberi wewenang untuk mengambil keputusan, yang menurut Max Weber terbagi menjadi tiga jenis: karismatik, tradisional, dan legal-rasional. Penggunaan otoritas harus dijalankan secara etis untuk menjaga kepercayaan dan keadilan.

Pemimpin pendidikan memiliki peran vital dalam mengarahkan visi lembaga, meningkatkan kinerja tenaga pendidik, membangun budaya organisasi yang positif, menjadi teladan moral, serta mendorong inovasi dan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Selain itu, kepemimpinan juga berfungsi dalam mengelola konflik dan menciptakan suasana kerja yang harmonis. Di Indonesia, sistem pendidikan dikelola oleh beberapa lembaga utama hasil restrukturisasi tahun 2024, yaitu: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) fokus pada peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) mengelola pendidikan tinggi dan riset. Kementerian Kebudayaan (Kemenbud RI) bertugas melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional. Dan Kementerian Agama (Kemenag RI) menangani pendidikan dan kehidupan keagamaan di Indonesia. Keberhasilan lembaga pendidikan bergantung pada kemampuan pemimpinnya dalam mengintegrasikan kepemimpinan visioner dan manajemen sistematis untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing global.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, N. (2020). *Ensiklopedia keragaman budaya*. Alprin.
- Al Haqiy, M. S., & Muttaqin, M. I. (2024). Peran kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja tenaga pendidik di sekolah islam. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 1(7), 712–724.
- Anggraini, W. D., Syoviana, E., Agustian, H., Hasan, A., Putra, H. E., & Syam, F. (2025). Peran strategis komite sekolah dan gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam optimalisasi mutu layanan pendidikan di sekolah menengah atas. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 13(2), 742–760.
- Arhanuddin Salim. (2023). Moderasi Beragama Implementasi Dalam Pendidikan, Agama dan Budaya Lokal Penulis: In *Rumah Moderasi Beragama (Rmb) Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (Lp2M) Iain Manado*. <https://philpapers.org/rec/ISMMBI>
- BRIN. (2025). *Profil Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)*. Badan Riset Inovasi Nasional. <https://www.brin.go.id/page/6/profil>
- Dari, S. W., Putra, V. P., Hasri, S., & Sohiron, S. (2023). Dinamika Kepemimpinan dalam Organisasi: Sebuah Analisis Komprehensif Mengenai Tipologi, Gaya, dan Peran Kepemimpinan dalam Meningkatkan Keberlanjutan Organisasi. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 12(4), 935–946.
- Duryat, H. M. (2021). *Kepemimpinan pendidikan: Meneguhkan legitimasi dalam berkontestasi di bidang pendidikan*. Penerbit Alfabeta.
- Efendi, N., & Sholeh, M. I. (2023). Manajemen pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran. *Academicus: Journal of Teaching and Learning*, 2(2), 68–85.
- Elia, S., Fauzan, A., & Bedi, F. (2023). Konsep Kepemimpinan dalam Guru Penggerak. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 9(5), 3429–3444.
- Ficky, F. U. A. (2024). Sumber Otoritas Pelaksanaan Supervisi. *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan*, 13(1).
- Gede, O. :, & Siswadi, A. (2025). Menalar Kebijakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Republik Indonesia dalam Perspektif Filsafat Pendidikan. *VIJNANA: Jurnal Hasil Penelitian Multidisiplin*, 1(1), 1–16.
- Ginting, R., & Haryati, T. (2012). Kepemimpinan dan Konteks Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, II(2), 1–17.

- 1578 *Analisis Manajemen Kepemimpinan dan Lembaga dalam Sistem Pendidikan di Kemenag, Dikdis, Dikbud, dan Kementerian Terkait - Zulfa Rahmat Hidayati, Kasful Anwar Us, Shalahudin*
DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v7i6.8637>
- Gore, K. (2025). Model Manajemen Kurikulum Adaptif/di Sekolah Multikultural Menengah Atas. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7 (4)(4), 960–968. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v7i4.8471>
- Gore, K., Liman, B., & Prastyo, T. (2025). *Manajemen Kepemimpinan Pendidik sebagai “ Pak Tani ” Menurut Perspektif Ki Hadjar Dewantara di Sekolah Menengah Atas*. 7(3), 630–636.
- Hasanah, U. (2025). Efektifitas Kepemimpinan Berbasis Local Wisdom pada Lembaga Pendidikan Islam. *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, 20(2), 182–190.
- Haudi. (2022). Manajemen Kepemimpinan Pendidikan di Sekolah. *Jurnal Ikraith-Humaniora*, 6(1), 24–30.
- Huriati, N., Nover, W. J., Budianto, Kadarsih, S., Septarian, Purnama, Indah, M. D., Fahrizal, M. A. S., Thontawi, M., Sofa, A., Purnama, B. Y., & Bagascary, A. A. (2025). *Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan Islam; Konseptual dan Adaptif*. Zabaqz qu Publish.
- Ihwan, M. B. (2025). *Kepemimpinan Visioner: Membangun Perilaku Organisasi Pendidikan yang Dinamis*. Insight Mediatama.
- Indonesia, P. R. (n.d.). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah*. Kementerian Sekretariat Negara. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/306926>
- Indonesia, P. R. (2024a). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah*. Kementerian Sekretariat Negara. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/306926>
- Indonesia, P. R. (2024b). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi*. Kementerian Sekretariat Negara. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/306927>
- Irsalulloh, D. B., & Maunah, B. (2023). Peran lembaga pendidikan dalam sistem pendidikan Indonesia. *Pendidkas: Jurnal Pendidikan Dasar*, 4(2), 17–26.
- Jin, F., Sun, L., Pan, Y., & Lin, C.-H. (2025). High heels, compass, spider-man, or drug? Metaphor analysis of generative artificial intelligence in academic writing. *Computers & Education*, 105248.
- Judijanto, L., de Araújo Sarmiento, A., Saefrudin, S., Runtu, A. R., & Meydiansyah, M. H. (2024). Pentingnya Kepemimpinan Dalam Manajemen Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Edukatif*, 10(2), 212–222.
- Kemdiktisaintek. (2024). *Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi*. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi. <https://kemdiktisaintek.go.id/tentang-kami/>
- Kemdiktisaintek. (2025). *Kemdiktisaintek Luncurkan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025*. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi. <https://kemdiktisaintek.go.id/kabar-dikti/kabar/kemdiktisaintek-luncurkan-program-penelitian-dan-pengabdian-kepada-masyarakat-tahun-2025/>
- Kementerian Agama RI. (2018). *Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Karim*. 40, 406.
- Khadijah, I., & Puspita, A. (2023). Reformasi Paradigma Pendidikan: Menuju Pendidikan Merata Dan Bermutu. *Shibyan: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 1(1), 39–48. <http://ojs.uninus.ac.id/index.php/JURSHIBYAN/index>
- Mawardi. (2022). LEMBAGA PENDIDIKAN SEBAGAI SUATU SISTEM SOSIAL. *Al Mujaddid Humaniora*, 11(8), 75–81.
- Mildawati, T., & Tangngareng, T. (2023). 1 Jenis-Jenis Pendidikan (Formal , Nonformal Dan Informal) Dalam Perspektif Islam. *Vifada Journal of Education*, 1(2), 1–28. <https://jurnal.vifada.id/index.php/edu/article/view/55>
- Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia. (2020). *Regulation of the Minister of*

- 1579 *Analisis Manajemen Kepemimpinan dan Lembaga dalam Sistem Pendidikan di Kemenag, Dikdis, Dikbud, dan Kementerian Terkait - Zulfa Rahmat Hidayati, Kasful Anwar Us, Shalahudin*
DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v7i6.8637>
- Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 9 of 2020 concerning Organization and Work Procedures of the Ministry of Education and Culture.* 1–8.
- Munir, M., Mubaroq, A., & Mustofa, B. (2025). tetapi juga berkarakter, berdaya saing, dan berkomitmen terhadap pembangunan nasional. *Journal of Excellence, Humanities and Religiosity*, 2, 65–77.
- Nasution, W. N. (2016). Kepemimpinan pendidikan di sekolah. *Jurnal Tarbiyah*, 22(1).
- Nul, B., & Yuliana, W. (2025). *Implikasi Yuridis Perpres Nomor 83 Tahun 2024 terhadap Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis*. 24(2), 267–283.
- Rachman, E. A., Humaeroh, D., Sari, D. Y., & Mulyanto, A. (2023). Kepemimpinan Visioner Dalam Pendidikan Karakter. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(2), 1024–1033.
<https://doi.org/10.31949/educatio.v9i2.5053>
- Raharjo, A. B. (2023). *Supervisi Pendidikan Fungsi Kepemimpinan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu*. Samudra Biru.
- RI. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61. Sekretariat Negara.
- RI, U. (2024). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 190 Tahun 2024 Tentang Kementerian Kebudayaan* (Issue 242682).
- Rini, W. A. (2006). Kepemimpinan yang membangun tim. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 2(2), 66–75.
- Rosita, I. (2024). Gaya Kepemimpinan, Komunikasi, Dan Pengambilan Keputusan Dalam Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pada Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Tarbiyah Almuslim*, 2(2), 137–151.
- Sahal, A. (2023). *Pengaruh tingkat pendidikan, jumlah tenaga kerja, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa tahun 2017-2021*. Diss. Universitas Islam Indonesia.
- Sandra, N. (2021). Pentingnya Manajemen Sumber Daya Manusia di Perusahaan. *Kompasiana.Com*, 10(2), 519–527.
<https://www.kompasiana.com/novika18259/60bdc9268ede487a2d5c50b2/pentingnya-manajemen-sumber-daya-manusia-di-perusahaan>
- Sanmarwi, S., & Sulastri, S. (2022). Pemanfaatan Hasil Asesmen Nasional Dalam Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Di Dki Jakarta. *Jurnal Lingkar Mutu Pendidikan*, 19(2), 97–110.
<https://doi.org/10.54124/jlmp.v19i2.93>
- Shobirin, M. (2016). *Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mengelola Sekolah Menengah Kejuruan Unggulan Nurul Islam Larangan Brebes (Penelitian Kualitatif)*. S-2 Manajemen Pendidikan Islam.
- Sidik, A. H. M., & Nugraha, M. S. (2024). Peran Stakeholder Kepala Sekolah Smp Ma'rif Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam. *EDUSIANA Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 11(2), 66–76.
- Sulhan, M., & Lessy, Z. (2022). Otoritas Tuan Guru Dan Dakwah Islam Pada Masyarakat Sasak Lombok: Analisis Teori Otoritas Max Weber. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 4(2), 101–113.
<https://doi.org/10.37758/m7cd7v15>
- Suryadi, F., Pasaribu, M. H., Siahaan, A. D., Sabri, A., & Lubis, Y. (2024). Peran manajemen pendidikan dalam mewujudkan sekolah berkualitas. *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan Dan Bahasa*, 3(4), 92–107.
- Suyana, N., Dalmeri, D., Sugiharto, S., & Jupriadi, J. (2024). Kebijakan Pendidikan Nasional Menghadapi Tantangan Global Sebuah Analisis Strategis dan Prioritas. *Journal of Education Research*, 5(1), 620–634. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i1.888>
- Syafii, A. (2018). Perluasan dan pemerataan akses kependidikan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). *Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 4(2), 153–171.

- 1580 *Analisis Manajemen Kepemimpinan dan Lembaga dalam Sistem Pendidikan di Kemenag, Diktis, Dikbud, dan Kementerian Terkait - Zulfa Rahmat Hidayati, Kasful Anwar Us, Shalahudin*
DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v7i6.8637>
- Syakdiyah, H., Sofa, A. R., & Sugianto, M. (2025). Keutamaan ilmu sebagai fondasi dalam membangun peradaban Islam di era modern: Perspektif nilai dan relevansi kontemporer. *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan Dan Bahasa*, 4(1), 43–54.
- Syakrani, A. W., Rahmah, A., & Aminah, S. (2025). Makna dan Hakikat Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Keguruan*, 3(7), 565–573.
- Syakur, A. K. A., Judijanto, L., Sa'dianoor, S., Syarweny, N., & Wibowo, S. E. (2025). *Kepemimpinan: Teori Pimpinan dalam Mempengaruhi Kinerja Tim*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Trisnia, F. R., & Ma'ad, F. A. Z. (2025). Efektivitas Kinerja Kepemimpinan Dalam Pendidikan: Hakikat, Orientasi Kelembagaan, Dan Urgensi Pemetaan Dinamisasi Kepemimpinan. *Jurnal Pendidikan Integratif*, 6(2).
- UURI. (2024). *PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 152 TAHUN 2024 TENTANG KEMENTERIAN AGAMA*.
- Wikipedia. (2025a). *Badan Riset dan Inovasi Nasional*. Wikipedia.
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Riset_dan_Inovasi_Nasional
- Wikipedia. (2025b). *Kementerian Agama Republik Indonesia*. Wikipedia.
https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Agama_Republik_Indonesia
- Yustika, Y., & Syamsiyah, S. N. (2020). Peran Kepemimpinan Dalam Organisasi Lembaga Pendidikan Islam. *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1).
- Yusup, M. (2018). Tanggung Jawab dan Otoritas Kepemimpinan Pendidikan Dalam Islam. *IDARAH: Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan*, 2(1), 54–72.